



Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Marwoto Hadi

Hibah Pilkada Sudah 100 Persen, Fasilitas Mamin Saksi di TPS

Komisi A DPRD Kota Yogyakarta belum lama ini mengadakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres Pemilu 2024. Komisi yang membidangi pemerintahan itu mengundang komisioner KPU dan Bawaslu Kota Yogyakarta.

"KAMI juga bahas rencana Pilkada 27 November 2024. Sampai sekarang hibah pilkada kami nyatakan sudah selesai 100 persen," kata Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Marwoto Hadi. Dikatakan, pelaksanaan pileg dan pilpres menjadi cermin. KPU perlu mengadakan persiapan sekaligus mengadakan pemutakhiran data pemilih. Marwoto menyarankan agar kedua institusi penyelenggara pemilu dan pilkada itu mengadakan

komunikasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. "Dinamika migrasi selama Januari-Mei 2024 ini cukup tinggi. Migrasi bukan soal kelahiran. Tapi perpindahan penduduk. Bukan kelahiran. Angkanya mencapai 1000 orang," bebarnya. Dia berharap itu dilakukan agar tidak muncul kegaduhan saat coblosan. Misalnya, tidak terdaftar sebagai pemilih namun ber-KTP Kota Yogyakarta

sehingga bisa ikut memilih. Marwoto menyarankan KPU agar rajin turun ke bawah. Mendatangi ke wilayah. "Persoalan mereka ber-KTP Kota Yogyakarta tapu tidak tinggal di Kota Yogyakarta harus juga dicermati. Sebaiknya, pengurus RT dan RW tidak bisa ditinggalkan," sarannya. Soal alat peraga kampanye (APK) perlu diatur lagi. Jangan sampai ada celah. Ketika ada pelanggaran, Marwoto ingin Bawalu bisa bertindak. Masalah APK,

regulasinya harus diperjelas dan diperkuat. Kembali soal pilkada, wakil rakyat yang tinggal di Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta itu, minta KPU bisa memfasilitasi makan minum (mamin) bagi saksi di TPS dan di tingkat PPK di kecamatan. Dibandingkan pileg dan pilpres, jumlahnya hanya separonya. Bahkan jumlah TPS dalam satu RW bisa jadi hanya satu. Belum lagi jumlah calon pasangan wali kota dan wakil wali kota tidak sebanyak caleg saat pemilu. (kus/zi)



Persoalan mereka ber-KTP Kota Yogyakarta tapu tidak tinggal di Kota Yogyakarta harus juga dicermati. Sebaiknya, pengurus RT dan RW tidak bisa ditinggalkan."

MARWOTO HADI
 Sekretaris Komisi A
 DPRD Kota Yogyakarta



EVALUASI:
 Pilkada masih lima bulan lagi. Belajar dari pengalaman pileg dan pilpres, saksi-saksi di TPS dan PPK perlu difasilitasi makan dan minum selama menjalankan tugasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005